

## KEPEMIMPINAN BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL VERSUS KONSEP WEWENANG MAX WEBER

<sup>1</sup> SUGIYANTO, <sup>1</sup> ANALIUS GIAWA, <sup>2</sup> MUSOLI

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: [probosugiyanto@gmail.com](mailto:probosugiyanto@gmail.com)

**Abstrak.** *The coordinating body of social welfare activities (BK3S), a non-governmental organization that has the task and responsibility of coordinating the implementation of social welfare efforts organized by social welfare institutions (LKS) for the community, especially gives services to people with social welfare problems. BK3S DIY social actions as government partners cq the social office has the authority to regulate, provide recommendations for licensing, advocate for organizations and strengthen the existence of LKS. The practice of organizing, coordinating, advocating and strengthening organizational governance is analyzed through Max Weber's authority theory. The results of the analysis of social actions in the practice of regulating, coordinating, advocating and engaging in strengthening institutions with Max Weber's theory of authority obtained organizational identity so that it looks strangely different from BK3S or other social organizations.*

**Keywords:** *Leadership; BK3S; Authority; Max Weber.*

**Abstrak.** Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) adalah lembaga non pemerintah. Tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai usaha kesejahteraan sosial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk masyarakat terutama memberi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tindakan sosial BK3S DIY sebagai mitra pemerintah cq dinas sosial mempunyai kewenangan mengatur, memberi rekomendasi perizinan, mengadvokasi organisasi dan memperkuat keberadaan LKS. Praktik mengatur, mengoordinasikan, mengadvokasi dan memperkuat tata kelola organisasi ini dianalisis melalui teori kewenangan Max Weber. Hasil analisis tindakan sosial dalam praktik pengaturan, koordinasi, advokasi dan keterlibatan memperkuat kelembagaan dengan teori kewenangan Max Weber diperoleh identitas organisasi sehingga tampak kekhasan dan pembeda dengan BK3S atau organisasi sosial lainnya.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan; BK3S; Wewenang; Max Weber.

## PENDAHULUAN

Paper ini mengupas secara teoritis konsep wewenang Max Weber yang dikaitkan dengan tataran praksis pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) anggota Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BK3S berdiri pada 2 Agustus 1975. Tahun 1983, BK3S berubah menjadi Badan Pembina dan Koordinasi Kegiatan Sosial (BPKKS). Berdasarkan Instruksi Mendagri Tahun 1985, BPKKS berubah nama kembali menjadi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) sampai sekarang. Tugas pokok BK3S adalah menyelenggarakan koordinasi usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan organisasi sosial (Orsos) atau masyarakat. Lembaga Koordinasi BK3S DIY telah dikukuhkan dan disahkan sebagai satu-satunya Badan Koordinasi Organisasi Sosial di DIY dengan Keputusan Gubernur DIY No.181/KPTS/1985.

Dalam perkembangannya, BK3S DIY dalam melakukan kegiatannya selalu beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. BK3S DIY masih eksis dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung, melalui LKS dan instansi terkait di wilayah DIY. Hal ini sebagai bukti bahwa BK3S masih dipercaya oleh *stakeholders* dalam melakukan koordinasi, pengelolaan dan penyaluran bantuan masyarakat dari donatur dalam dan luar negeri.

Pada awalnya, BK3S mengoordinasi seluruh orsos yang ada dan terdaftar di Dinas Sosial Propinsi DIY. Seiring Otonomi Daerah (Otda) dalam UU No. 22/1999 dan dengan terbentuknya Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) di tingkat kabupaten dan kota, maka LKS yang menjadi anggota BK3S Propinsi DIY adalah organisasi sosial tingkat propinsi yang mempunyai wilayah kerja minimal dua wilayah kabupaten/kota dan organisasi sosial tingkat nasional yang ada di Propinsi DIY.

**Tabel 1.1 Data LKS DIY**

No.	Dinas Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah LKS	Anggota BK3S
1	Kota Yogyakarta	62	55
2	Kabupaten Bantul	73	46
3	Kabupaten Kulonprogo	25	15
4	Kabupaten Gunungkidul	67	60
5	Kabupaten Sleman	89	75
<b>Jumlah</b>		<b>316</b>	<b>251</b>

*Sumber: Dinas Sosial DIY 2019*

BK3S DIY adalah organisasi sosial koordinatif non pemerintah, mandiri dan non profit dan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. BK3S Propinsi DIY memiliki dua fungsi, yaitu: a) sebagai mitra pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial di Propinsi DIY dengan mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat dan LKS yang bergerak di bidang sosial; b). sebagai mitra pemerintah mengoordinasikan pengembangan sumber daya kesejahteraan sosial, dan mengembangkan metodologi dan riset penggalian sumber dana untuk kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di provinsi DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh BK3S antara lain: 1) Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi orsos untuk saling tukar informasi dan pengalaman mengenai berbagai masalah kesejahteraan sosial dan upaya penanganannya; 2) Menyebarluaskan pengertian dan masalah kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan upaya penanganan PMKS; 3) Mengadakan kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan badan/lembaga/organisasi/dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri; 4) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penelitian dan pengembangan UKS untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah propinsi DIY; 5) Membuat laporan kepada Gubernur Propinsi DIY, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), badan/lembaga terkait tentang masalah sosial di DIY dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat dan LKS; 6). Melakukan usaha penggalian dan pengumpulan dana dari dalam dan luar negeri, untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial di DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek struktur, BK3S DIY tidak punya hubungan hierarkis dengan organisasi sosial manapun, melainkan hubungan konsultatif-koordinatif dengan DNIKS, dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) kabupaten/kota dan dengan organisasi sosial. Struktur BK3S DIY terdiri dari pembina, dewan penyantun dan pengurus. Pengurus terdiri dari ketua umum, ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang. Program kerja dilaksanakan dalam lima bidang yakni meliputi: 1) pendidikan & pelatihan, 2) pemberdayaan dan pelayanan; 3) hukum & advokasi, 4) pengembangan program & data, dan 5) humas, publikasi, & informasi. Pengambilan keputusan tertinggi para anggota dan pengurus terletak di tangan musyawarah daerah yang diselenggarakan

empat tahun sekali.

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka terdapat 3 (tiga) pertanyaan: 1) Bagaimana pengurus menggunakan kewenangan dan kekuasaan dalam praktik kepemimpinan terhadap para anggota? 2) Strategi apa yang menjadi pijakan pemimpin untuk meyakinkan costumer (anggota dan pemerintah)? 3) Mengapa BK3S lahir berkembang dan dipertahankan oleh *stakeholder* termasuk pemerintah Propinsi DIY? 4) Motivasi apa yang mendorong para individu bersedia menjadi pengurus BK3S, mengingat BK3S sebagai organisasi sosial non-pemerintah dan non profit, pengurus tidak memperoleh *reward* dalam bentuk gaji? 5). Budaya organisasi dalam bentuk apa yang dibangun para oleh pendiri/perintis sehingga kuat sampai saat ini?

## METODE

Studi kepemimpinan BK3S versus konsep wewenang Max Weber dilakukan di DIY melalui studi literatur beberapa jurnal dan hasil penelitian tentang kepemimpinan organisasi sosial, selanjutnya ditindaklanjuti dengan observasi langsung dan *action research*. *Action research* dilakukan dengan melibatkan diri dalam aktivitas pengurus BK3S dan ragam Dinas Sosial DIY. Pengumpulan data, analisis data dan penulisan laporan menggunakan model kualitatif. Kepemimpinan BK3S DIY versus wewenang Max Weber dapat dipetakan dari sejarah BK3S, figur pemimpin, pola memimpin, cara pengambilan keputusan dan model regenerasi kepemimpinan. Mengingat pemimpin sangat menentukan dinamika organisasi, dan organisasi BK3S ada jaminan keberlanjutan karena BK3S sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

## HASIL DAN DISKUSI

BK3S merupakan organisasi sosial yang unik dan terawat dengan baik oleh setiap generasi. Keunikan tersebut memenuhi unsur-unsur yang jadi pembentuk identitas. Sobirin (2010) menjelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang dinilai sebagai pembentuk identitas, yaitu kekhasan, kesamaan, dan pembeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Unsur Pembentuk Identitas BK3S DIY**

Indikator	Sejarah Kelahiran	Keanggotaan	Pemimpin
Kekhasan	Pada awalnya, BK3S merupakan organisasi sosial bentukan pemerintah	Organisasi sosial yang bergerak di bidang kecacatan, napza, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, lansia, orang dengan gangguan jiwa, perlindungan HAM, penyimpangan perilaku & korban bencana maupun kekerasan	Pejuang sosial untuk keadilan dan kesejahteraan
Pembeda	Semua pengurus tidak mendapat <i>reward</i> (gaji), bersifat <i>charity</i> dan filantropi	Organisasi sosial yang memiliki wilayah kerja minimal dua wilayah kabupaten/kota. Organisasi sosial internasional yang memiliki wilayah kerja di DIY	Ketua umum selalu dijabat perempuan dan cenderung dari keluarga keraton
Kesamaan	Kewenangan & hak yang sama dengan BK3S propinsi lain.	Penentu hasil Musda Mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus	Masa jabatannya sama seperti pengurus BK3S propinsi yang lain.

*Sumber: data primer 2017*

Bagaimana pengurus BK3S menggunakan kewenangan dan kekuasaan dalam praktik kepemimpinan terhadap para anggota? Mac Iver (1954) menyebut kekuasaan sebagai kemampuan mengendalikan tingkah laku orang lain, baik langsung dengan perintah, maupun tidak langsung dengan alat dan cara yang tersedia. Pandangan lain menyebut kekuasaan sebagai kemampuan laten, atau potensi seseorang untuk mempengaruhi tindakan, pemikiran, atau emosi orang lain. Kekuasaan juga berarti energi sosial yang menunggu untuk ditransformasikan ke dalam bentuk pengaruh. Kekuasaan bersifat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Untuk ditransformasikan dari kekuatan potensi menjadi kekuatan kinestik, Max Weber menempatkan masalah ini dalam telaah secara sosiologis, sebagai masalah sosial dan kebudayaan.

Weber menyebut sosiologi sebagai ilmu yang berusaha menggali pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial agar sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. "Tindakan" adalah merujuk semua perilaku manusia sepanjang individu yang bertindak itu

memberikan arti subjektif kepada tindakan itu. Sedangkan “tindakan sosial” dipahami sebagai tindakan subjektif yang dihubungkan dengan orang lain oleh individu yang bertindak dan memperhitungkan perilaku orang lain yang diarahkan ke tujuan tertentu (Paul, 1986).

Weber juga mengenalkan metode *verstehen*. Dengan metode ini, Weber hendak membangun suatu pengertian yang kuat dan valid mengenai tindakan subyektif manusia. *Verstehen* bukan sekedar laku memahami tindakan orang lain, melainkan upaya untuk mengaktifkan kemampuan empati atas orang lain, kemampuan memposisikan diri dalam posisi dan peran orang lain, dan kemampuan memposisikan diri dalam pola pikir orang lain. Di dalam pendekatan interaksionisme simbolik, konsep ini dikenal sebagai perilaku “mengambil peran” (Paul, 1986). Konsepsi tindakan sosial Max Weber terbagi kedalam empat pola: 1) *Zweckrationalitat* atau rasionalitas instrumental; 2) *Wertrationalitat* atau rasionalitas yang berorientasi nilai (*value*); 3) Afektif; dan 4) Tradisional.

### Tindakan Sosial dan Strategi Kepemimpinan BK3S

Tindakan sosial pengurus dalam menggunakan kuasa dan wewenang terhadap anggota dan mitra kerja dan pemerintah sangat tegas. Kewenangan digunakan secara maksimal dan tegas khususnya untuk perizinan jika orsos tidak memenuhi persyaratan, maka rekomendasi tidak akan diberikan. BK3S punya kuasa baik di hadapan anggota, mitra dan pemerintah. Demikian dengan ketegasan, ada sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar maupun sikap tidak patut yang dilakukan oleh mitranya. Tindakan ini sesuai dengan hasil studi Sujanto (2014), pengurus bekerja sesuai prosedur internal maupun eksternal, dan pengurus taat pada norma organisasi. Tindakan sosial pengurus menaati regulasi negara dan regulasi internal mendukung hasil studi Breen et al (2019) tentang interaksi regulasi negara dan regulasi mandiri yang mampu mendorong perubahan organisasi.

Strategi apa yang jadi pijakan pemimpin meyakinkan *costumer* (anggota dan pemerintah) dalam melaksanakan wewenangnya? Kita uraikan empat tipe tindakan sosial Max Weber. Pertama, *Zweckrationalitat* adalah tindakan sosial yang berdasar kalkulasi rasional. Pola tindakan ini terlihat saat mitra BK3S menanggapi lingkungan eksternalnya dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam tindakan ini, pemahaman saran dan prasarana diusahakan semaksimal mungkin saat BK3S memproses orsos yang melakukan

penyimpangan dari visi misi organisasi. Tindakan *Zweckrationalitat* BK3S mendukung hasil studi Alkhatiri (2017) bahwa intervensi komitmen berpengaruh terhadap keputusan keadilan organisasi.

Kedua, *Wertrationalitat*, tindakan sosial rasional yang berdasar nilai-nilai absolut tertentu baik nilai etis, religius, dan estetis. Pola tindakan di BK3S berdasar pada kode etik profesi pekerjaan sosial. Misalnya, BK3S menuntaskan pelecehan terhadap anak difabel dengan berpegang pada keyakinan nilai-nilai tertentu (Novayana dan Hanthasa, 2015). Ketiga, Tindakan afektif, tindakan sosial yang berpijak pada motivasi bersifat emosional. Di BK3S, sering ditemukan perselisihan antar orsos. Ketika memahami konsep dan persepsi setiap aturan/perundang-undangan baru, maka perlu meluruskan kepada setiap anggota dan faktanya tidak setiap aturan negara mampu mendorong perkembangan organisasi, situasi ini sesuai hasil studi Zulkhibri (2014).

Keempat, tindakan tradisional, yaitu tindakan sosial yang didorong dan berdasar tradisi masa lampau. Tradisi adalah kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan semacam ini selalu berlandaskan hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat (Hotman M. Siahaan, 1983). Dalam sejarah kepengurusan, BK3S senantiasa dipimpin seorang wanita dan cenderung berasal dari lingkungan keraton. Ini berpengaruh pada penggunaa kewenangan di setiap periode kepemimpinan. Situasi kepemimpinan BK3S DIY mendukung studi Felicio et al (2013) bahwa hubungan kepemimpinan transformasional memberi dukungan atas nilai sosial dan berpengaruh pada kinerja organisasi.

Keempat tindakan sosial Weber di atas banyak mempengaruhi pola hubungan sosial serta struktur di masyarakat. Weber membagi tiga dimensi kehidupan sosial. Seperti dikutip Reinhard (1962), tiga dimensi itu meliputi: *authority* (wewenang), *material interest* (kepentingan materil), dan *value orientation* (orientasi nilai). Melalui pendekatan ini, maka keberadaan BK3S bisa ditinjau melalui masing-masing periode atas relasi, dan jaringan yang dibawa oleh setiap ketua terpilih. Situasi ini sangat tampak pada *authority*/wewenang. Weber mengartikan *authority* (berbeda dari *power*) sebagai perintah yang datang dari seseorang yang berada dalam sebuah kedudukan/posisi jabatan tertentu, dan kemungkinan diikuti oleh orang-orang. Sumber *power* berasal dari personal, sementara *authority* terdapat pada jabatan yang dimilikinya (Nasikun, 1985).

Dalam konteks organisasional BK3S, terlihat dalam struktur bidang dan kelompok kerja yang menunjukkan bagaimana penggunaan wewenang berpengaruh pada dinamika bidang dan kelompok kerja. Atas dasar itu, kekuatan pengaruh terhadap kepercayaan, emosi dan tindakan telah dilakukan riset oleh King and Griffin (2019) yang membuktikan bahwa pengelolaan internal organisasi menghasilkan demokrasi di tempat kerja dan etika kebijakan yang mendorong organisasi agar dikelola dengan baik dan berpusat pada peningkatan kinerja.

Selanjutnya mengapa BK3S lahir berkembang dan dipertahankan oleh *stakeholder* termasuk pemerintah Propinsi DIY? Dalam konteks organisasional, isu struktural yang utama, terlepas dari kapabilitas personalitas, menyatakan struktur pendirian dan bagaimana peran, harapan dan alokasi sumber daya didefinisikan untuk orang dan kelompok pada organisasi, maka kekuatan struktural menyebabkan spesialisasi dan bidang diperluas karena memiliki fungsi, peran dan alokasi sumber daya (Pleffer, 1980). *Stakeholder* memiliki keyakinan bahwa di dalam organisasi BK3S terdapat konstelasi keyakinan, nilai, teknik dan sebagainya yang dianut bersama-sama oleh anggota dan *community*.

Ritzer (1980) menyebut paradigma sebagai perspektif ilmuwan mengenai suatu pokok persoalan yang mesti dipelajari dari suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Ada tiga paradigma yaitu: a) Paradigma Fakta Sosial; b) Paradigma Definisi Sosial; c); Paradigma Perilaku Sosial. Ketiga paradigma dikembangkan oleh para *stakeholder* atau pemangku kepentingan sesuai dengan persoalan yang berbeda satu dengan yang lain dan dengan metode pendekatannya sendiri-sendiri untuk memberi dukungan fungsinya setiap *stakeholder*. Dalam praktiknya masing-masing organ BK3S bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan satu ikatan yang sama “memberi pelayanan terbaik bagi anggota dan membantu Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di DIY”.

Motivasi apa yang mendorong para individu bersedia menjadi pengurus BK3S, mengingat BK3S sebagai organisasi sosial non pemerintah dan non profit, sehingga pengurus tidak memperoleh *reward* dalam bentuk gaji? Alasan paling kuat adalah *motif charity* sebagai pejuang sosial. Tetapi di balik itu semua, ada dinamika di dalam pengurus dalam bentuk inter-grup (antar kelompok di dalam) organisasi, yaitu sistem kompleks yang diilustrasikan sebagai jaring laba-laba yang bertumpukan, saling terpintal dan memperebutkan koalisi dari individual, group formal dan informal, yang masing-masing memiliki

ketertarikan, kepercayaan, nilai, kesukaan, persepsi koalisi yang saling bersaing terus untuk berebut sumber daya dengan tetap satu komitmen mewujudkan tata kelola yang baik dan menolak berbagai bentuk otoritarian, kolusi, korupsi, nepotisme dan tindakan-tindakan jahat lainnya (Adi, 2017).

Konflik tidak dapat dihindari, pengaruh atas kekuasaan dan aktivitas politis dijaga kekuasaan-politik. Pengaruh sangat penting dan menjadi fakta permanen kalau organisasi itu hidup. Jadi pengurus BK3S walaupun tidak memperoleh *reward* berupa materi, mereka senang dan bangga dengan *reward* non-materi berbentuk status dalam struktur sosial masyarakat, tetapi bukan bermaksud pamer dan *jor-joran* seperti pendapat Veblen (2005).

Budaya organisasi dalam bentuk apa yang dibangun para pendiri sehingga kuat sampai saat ini? Dalam tindakan sosial manusia melakukan hubungan sosial yang sangat kompleks. Tugas sosiolog adalah menyederhanakan hubungan sosial termasuk konsep-konsep mengenai negara, perserikatan, dan segala yang terkait di dalamnya. Jadi tindakan sosial manusia adalah tindakan yang menyangkut segala tindakan individu sejauh hal itu merupakan fakta sosial dan supaya semuanya itu dapat memiliki makna dan arti yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, maka konsep-konsep yang ada perlu disederhanakan senyata mungkin, sehingga dapat dengan mudah dan dipahami.

Kepemimpinan adalah proses keterlibatan personal melalui individu yang mempengaruhi kepercayaan dan tindakan lebih dari satu orang. Bukan rahasia lagi isu tumpang tindihnya kepemimpinan dan kekuasaan dalam organisasi. Sejarah kepemimpinan dan kekuasaan Max Weber (1922) dan Henri Foyal (1949) memiliki kesamaan. Mereka berasumsi kekuasaan dan peraturan formal dilaksanakan oleh otoritas, mengalir ke bawah melalui orang yang menguasai kantor untuk menggantikan peran sampai pada level bawahnya dalam hirarki organisasi. Pendapat ini didukung “teori modern perspektif struktural organisasi” (Shafritz, 1987) yang melihat otoritas sebagai sumber dari kekuasaan, pengawas dan manajer. Kekuasaan dilegitimasi seseorang yang berada pada posisi struktur tertentu.

Haire (1959) memulai konsep kekuasaan dengan konsep manusia. Haire mulai dengan pertanyaan: mengapa orang dalam organisasi mau melakukan apa yang diperintahkan? Jawabannya bisa ditemukan dalam artikel Sennet 1980, bahwa ilustrasi dimulai dari dua isu yang berhubungan tetapi terpisah: a) konsep kekuasaan di dalam organisasi dan perubahan pada basis sejarah organisasi; dan

b) perubahan konsep pada kebiasaan manusia. Pertanyaan Kekuasaan dalam masyarakat tidak dapat dijawab dengan sistem pengetahuan kita yang sudah ada. Bertolak dari hal-hal tersebut Weber merumuskan lima pokok "tindakan manusia" sebagai fokus riset sosiologi. Pertama, tindakan "nyata" manusia mengandung maksud/makna subyektif. Kedua, tindakan tersebut sepenuhnya bersifat batin. Ketiga, tindakan tersebut bisa jadi didorong pengaruh positif situasi tertentu, berasal dari tindakan yang berulang-ulang, atau tindakan yang secara diam-diam memperoleh persetujuan. Keempat, tindakan itu memiliki arah (orientasi) atas seseorang atau individu lain. Kelima, tindakan tersebut juga mengandung perhatian atas tindakan orang lain (George, 1985). Aplikasi BK3S DIY dalam memaknai sasaran sosiologi Max Weber disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3 Tindakan Manusia Max Weber versus BK3S DIY**

No	Makna Tindakan Manusia	Aplikasi BK3S DIY
1	Mengandung makna subyektif	Aktivitas BK3S DIY fokus pada bidang kesejahteraan sosial
2	Nyata bersifat subyektif	Sasaran kegiatan BK3S bersifat subyektif demi memenuhi 'social welfare' untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik individu, keluarga maupun kelompok masyarakat.
3	Pengaruh positif, sengaja diulang dan dibangun melalui persetujuan	Semua aktivitas diawali dengan MoU dengan persetujuan professional antar stakeholder
4	Tindakan diorientasikan kepada seseorang (individu) atau kelompok	Menolong kepada siapa saja (individu PMKS, organisasi sosial, pemerintah)
5	Memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain	BK3S DIY dalam menjalankan roda organisasi tidak egois, artinya dapat bekerjasama dengan semua pihak dengan norma saling menghormati, menghargai dengan prinsip simbiosis mutualisme.

*Sumber: data primer diolah 2019*

Dari segi waktu, tindakan sosial dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Tindakan sosial pada waktu sekarang; 2) Tindakan sosial pada waktu yang lalu; 3). Tindakan sosial pada waktu yang akan datang. Dari segi sasaran yang ingin dituju, tindakan sosial terbagi: 1) diarahkan pada sekelompok masyarakat, dan 2) diarahkan pada individu.

Motif tindakan sosial yang berasal dari tindakan individu dapat dipahami dengan dua cara yaitu melalui kesungguhan dan mencoba menyelami

pengalaman si pelaku. Para pelaku pemimpin di BK3S DIY menyatakan bahwa mandat yang diterima sebagai pemimpin merupakan ladang ibadah dan mengimplementasikan harapan dan keinginan dalam menolong organisasi sosial dan individu-individu yang hidupnya menghadapi permasalahan sosial. Sehingga apabila program yang disusun dapat dilaksanakan dan berhasil maka keuntungan yang diperoleh adalah kepuasan dan kebahagiaan bersama, dalam wujud riil mendapat kepercayaan dari berbagai *stakeholder* yang semuanya terangkum dalam aplikasi tabel 2 di atas.

Serangkaian wewenang pimpinan BK3S apabila direalisasikan ke dalam paradigma sosial, yang dibedakan antara *authority* dan *power* oleh Weber, sangat sulit dipisahkan satu dengan lain. Pengurus BK3S dalam menggunakan wewenang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bersifat kasuistik, formal, non formal, dan tugas harian, serta kepada siapa wewenang itu dipraktikkan (Sugiyanto et al, 2017).

Dalam kasus tertentu, BK3S menggunakan kearifan lokal sesuai dengan sejarah kelahirannya dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya, serta kekuasaan memerintah. Praktik ini senada dengan pemaknaan wewenang menurut Seligman (1959):

*“Authority is the capacity, innate or acquired, for exercising ascendancy over grup. It is manifestation of power and implies obediences on the part of those subject to it. One of the principle means reward and punishment”.*

Wewenang merupakan suatu kemampuan seseorang. Ia dapat berasal dari bawaan manusia sejak lahir atau dari tindakan manusia setelah ia melakukan suatu kegiatan dalam rangka mempengaruhi kelompoknya. Wewenang merupakan manifestasi kekuasaan, yang tidak bisa dipisahkan dari subjek yang memiliki kekuasaan. Hal paling penting di dalam wewenang adalah pemberian imbalan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). *Reward* diberikan kepada yang menguntungkan kedudukan subjek. *Punishment* diberikan kepada mereka yang merugikan kedudukan subjek.

Di dalam definisi sosial, struktur dan institusi sosial merupakan fakta sosial yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti hubungan antara kekuasaan dan wewenang. Dengan kekuasaan dan wewenang, maka subjek dapat melakukan suatu tindakan sosial. Dalam hal ini, ketua BK3S sosok yang memiliki kharisma dan dihormati oleh masyarakat sebagai simbol dari unsur pemimpin rakyat. Dengan demikian, wewenang dilaksanakan dengan baik

bila seseorang memiliki kekuasaan terutama yang didukung oleh intitusi dan struktur sosial, formal maupun non formal yaitu kerajaan Mataram Yogyakarta. Sebab itu, konsep wewenang itu masih sangat kompleks, luas dan menjadi kewajiban ilmuwan sosial khususnya para sosiolog untuk dapat menjelaskannya sekonkrit-konkritnya, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Menurut Max Weber, wewenang mengacu kepada unsur pemaksaan kekuasaan. Untuk itu perlu dimiliki suatu pengertian yang sederhana tentang wewenang, walaupun dalam praktiknya di BK3S tidak perlu menggunakan pemaksaan karena kesadaran pemimpin dan yang dipimpin. Dan faktanya wewenang dapat dipergunakan seseorang untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil terutama dalam kehidupan sosial. Wewenang yang dimiliki seseorang dapat dijadikan petunjuk untuk berhubungan dengan orang lain, untuk bekerja sama baik dalam kehidupan sosial maupun dalam hubungan kelembagaan. Jadi walaupun wewenang itu ada di dalam diri seseorang tetapi akan berarti dan bermakna apabila berada dalam kaitan antara individu dengan individu yang lain, dan antara individu dengan kelompok-kelompok sosial.

Compbell (1981) menyebut beberapa jenis wewenang yaitu: 1) traditional authority (wewenang tradisional); 2) charismatic authority (wewenang kharismatik); 3) rational or legal authority (wewenang rasional atau wewenang legal). Praktik penerapan wewenang BK3S DIY adalah campuran dari semua hal di atas dan semua sah atau valid. Sesuai pandangan Soekanto (1985) bahwa melalui tradisi yang sah, melalui keterkaitan emosional yang dianggap baik harus dianut, keyakinan terhadap nilai-nilai yang mutlak adalah sah dan pernyataan positif yang legal dan tidak boleh dipermasalahkan kembali karena kesepakatan secara suka rela.

Dengan demikian usaha manusia dalam rangka mempertahankan wewenang harus diperhitungkan dengan matang karena menyangkut opini masyarakat. Wewenang yang sah didasarkan pada kepercayaan atas nilai-nilai mutlak yang biasanya didasarkan pada gagasan-gagasan mengenai hukum alam. Validitas terhadap wewenang yang ada pada umumnya berkembang dengan sendirinya dan walaupun demikian selalu berkembang sesuai perkembangan akal pikiran manusia. Wewenang yang demikian ini berkembang dengan sendirinya sesuai kenyataan di masyarakat sehingga lebih faktual. Hanya saja wewenang kadang-kadang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan idealisme dari pemegang wewenang itu. Wewenang tersebut dapat memiliki

pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat. Menurut Soekanto (1985) perlu dibedakan antara idealisme, hukum tradisional, hukum kepercayaan, dan hukum yang sengaja ditetapkan.

Fakta unik yang terjadi di BK3S DIY bahwa wewenang pimpinan diwujudkan tanpa ada paksaan dan ini valid. Faktor kerelaan dan nilai kebanggaan bagi pengurus dapat bersama keluarga kerajaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di antara mereka dapat melakukan interaksi sosial seperti yang telah diuraikan pada pembahasan paradigma definisi sosial di muka. Perlu dicatat pula walaupun manusia memiliki kebebasan menentukan pilihan, tetapi pertimbangan norma-norma yang ada sangat dibutuhkan. Jadi menurut pandangan sosiologi kiranya yang terbaik untuk ini adalah bagaimana wewenang itu dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian yang bertujuan mengetahui bagaimana pengurus menggunakan kewenangan dan kekuasaan dalam praktik kepemimpinan terhadap para anggota ternyata telah terjawab, bahwa wewenang yang dipraktikkan berbasis kearifan lokal seperti yang disebutkan Campbell (1981). Strategi yang dijadikan pijakan pemimpin untuk meyakinkan *stakeholder* adalah keterbukaan, kebersamaan dan pelayanan terbaik untuk anggota, sehingga BK3S dari lahir sampai saat ini dipertahankan oleh *stakeholder*. Sedang motivasi yang mendorong individu bersedia menjadi pengurus BK3S adalah kebanggaan dapat berinteraksi dengan keluarga kerajaan dan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan sosial di DIY, sehingga mereka tidak memikirkan *reward* karena keikhlasannya didukung dengan budaya yang mampu membentuk karakter tanpa paksaan.

Implikasi akademis dari penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut hasil dari praktik penerapan wewenang teori Max Weber di BK3S di luar DIY, sehingga akan diketahui apakah model BK3S DIY dapat diadopsi para ketua BK3S di daerah lain atau para pimpinan organisasi nirlaba dalam menggerakkan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi. Disisi lain perlu dikembangkan penelitian dengan subyek dan obyek yang sama untuk mencari tahu perihal bagaimana pemimpin BK3S DIY memilih warga untuk dijadikan pengurus sebagai tim dalam organisasi BK3S.

## DAFTAR PUSTAKA

- Felício, J.A., Gonçalves, H.M., and Gonçalves, V.C. (2013). "Social Value and Organizational Performance In Non-Profit Social Organizations: Social Entrepreneurship, Leadership, and Socioeconomic Context Effects". *Journal of Business Research* 66 (10): 2139–2146. DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.02.040
- Reinhard, B. (1962). *Max Weber: An Intellectual Portrait*. New York: Anshor Books Doubleday and Company, Inc, Garden City.
- Campell, T. (1981). *Seven Theories of Human Society*. Macmillan India Ltd, Bangalore 25, 180.
- Haire, M. (1959). *Modern Organization Theory*. New York, John Wiley, Inc, pp324. 67-75.
- Edwin RA Seligman. (1959). *Encyclopedia of the Sosial Sciences*, The Macmillan Company, New York, 319.
- Goodwin, B. (2003). *Using Political Ideas*, ed ke-4 (West Sussex, England: Barbara Goodwin, 2003).
- Hotman M. Siahaan. (1983). *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga Surabaya, 220.
- Paul, J.D. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Gramedia Jakarta, 214-221.
- Mac Iver, RM and Page, C.H. (1954). *Society: An Instroduction Analysis*. Rinehart and Company, New York.
- Nasikun. (1985). *Sistem Sosial Indonesia*. CV. Rajawali, Jakarta, 18.
- Novayana, W dan Hanathasia, M. (2015). Penerapan Komunitas Merek Organisasi Non Profit dari Perspektif Sosial Marketing Public Relations (Studi Komunitas Merek "Sahabat Ambudsmen"). *Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie*, Jakarta, 23 Juli 2016.
- George, R. (1980). *Sosiology A Multiple Paradigm Science*, Revise edition, Allyn and Bacon Inc. Boston, 83-140.
- Pfeffer, J. (1980). *The External Control of Organizations: A Resource Depedence Perspective*. New York, NY: Harper and Row.
- Soekanto, S. (1985). *Max Weber*. Rajawali Press, Jakarta, 72-73.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi II. Rajawali Press, Jakarta, 259-261.

- Sobirin, A. (2010). *Hakekat Identitas Diri: Sebuah Kajian Filosofis dan Psikologis*. Working Paper, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyanto, Tjahjono. HK., Hortono. A., Khuluq. L. (2017). Phenomenological Study on the Governance of “Sosial Welfare Institutions” in Special Region of Yogyakarta. *The 30<sup>th</sup> International Business Information Management association Conference (IBIMA)*, Madrid Spain.
- Sujanto, B.A. (2014). *Efektivitas Peran Relawan Penanggulangan Bencana Pada Tanggap Darurat Banjir Jakarta Timur Dalam Rangka Penyelamatan Korban Manusia*. Prodi Manajemen Bencana untuk nasional, Universitas Pertahanan Nasional, Bogor.
- Seligman. M,E,P. (2006). *Learned Optimis:Ho To Change Your Mind and Your Life*, New York: Pocket Books.
- Shafritz, J.M. and Russell. E.W. (1999). *Introducing Public Administration*. Sccond edition. New York Longman.
- Sennet, R. (1994). *Flesh and Stone: The Body and The City In Western Civilzation*, London Faber and Faber.
- Veblen, T. (2005). *The Theory of The Leisure Class*, New York, Noorwood Mass.
- Zulhibri, M. (2014). Regulation governing non-profit organisations in developing countries A comperative analysis. *International Journal of Law and Management*. Vol. 56 Issue: 4, pp. 251-273.